



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS BATAM

UNIT KERJA : ANGGOTA/DEPUTI BIDANG PENGELOLAAN LAHAN, PESISIR, DAN
REKLAMASI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SYARLIN JOYO
2. Jabatan : ANGGOTA/DEPUTI BIDANG PENGELOLAAN LAHAN, PESISIR, DAN
REKLAMASI
3. NHK : 1006122

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 3.050.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m²/70 m² di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
2. Tanah Seluas 11.491 m² di KAB / KOTA LAHAT, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. Tanah Seluas 16.471 m² di KAB / KOTA LAHAT, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
4. Tanah Seluas 16.534 m² di KAB / KOTA LAHAT, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
5. Tanah Seluas 18.244 m² di KAB / KOTA LAHAT, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
6. Tanah Seluas 1.160 m² di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
7. Tanah Seluas 750 m² di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 157.000.000

1. MOBIL, TOYOTA I INNOVA G DIESEL Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. MOTOR, YAMAHA JUPITER MX 135 CC Tahun 2007, HASIL



SENDIRI Rp. 4.000.000

3. MOTOR, YAMAHA S4P (CAST WHEEL) A/T Tahun 2012, HASIL

SENDIRI Rp. 3.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	---
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	370.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	3.577.000.000
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.577.000.000

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.